

PENGARUH AKREDITASI TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 2 PUJUT: ANALISIS IMPLIKASI AKREDITASI B BERBASIS RAPOR PENDIDIKAN 2025

LL. Herry Anggara¹, Roihatul Ilmi², Muhammad Sanusi³, Marisa Arni⁴, Basilius Redan Werang⁵

¹Program Studi Administrasi Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha

anggaran1984@gmail.com, roihatulilmi18@gmail.com,
muhammadsanusija31@gmail.com, anawwamarissa@gmail.com,
werang267@undiksha.ac.id

ABSTRACT

School accreditation is an external quality assurance mechanism expected to shape school policies, programs, and resource allocation. This study examines the implications of a B accreditation status for education policy at SMP Negeri 2 Pujut through a descriptive-evaluative case study. Data were obtained from the school profile, teacher records, the 2025 Education Report, data-based planning recommendations, and the Annual Work Plan and ARKAS worksheets. The analysis involved data reduction, indicator classification, comparison of 2024 and 2025 achievements, and document triangulation. The results show that accreditation is associated with stronger attention to learning outcomes and service standards. Literacy increased by 33.34 points to 66.67 percent, while numeracy increased by 28.88 points to 64.44 percent. However, implementation remained inconsistent. The school program and policy indicator declined by 4.10 points to 61.90. Anti-bullying policy decreased by 12.47 points, sexual violence prevention policy by 9.01 points, and spending on teacher quality improvement reached only 2.76 percent. The facility index was 70.90, but room feasibility was only 22.22. The Annual Work Plan and ARKAS did not yet contain operational programs. Accreditation has therefore triggered a quality agenda, but it has not fully functioned as a continuous policy control system. The school should integrate accreditation findings and Education Report data into annual planning, budgeting, performance indicators, and quarterly evaluation.

Keywords: *school accreditation, education policy, quality assurance, Education Report, data-based planning*

ABSTRAK

Akreditasi sekolah merupakan mekanisme penjaminan mutu eksternal yang seharusnya memengaruhi kebijakan, program, dan alokasi sumber daya sekolah. Penelitian ini menganalisis implikasi status akreditasi B terhadap kebijakan pendidikan di SMP Negeri 2 Pujut melalui studi kasus deskriptif-evaluatif. Data bersumber dari profil sekolah, daftar guru, Rapor Pendidikan 2025, rekomendasi Perencanaan Berbasis Data, serta lembar Rencana Kerja Tahunan dan ARKAS. Analisis mencakup reduksi data, pengelompokan indikator, perbandingan capaian 2024 dan 2025, serta triangulasi antardokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akreditasi berkaitan dengan penguatan perhatian terhadap hasil belajar dan standar layanan. Kemampuan literasi naik 33,34 poin menjadi 66,67 persen, sedangkan numerasi naik 28,88 poin menjadi 64,44 persen. Namun, implementasi kebijakan belum konsisten. Indikator program dan kebijakan sekolah turun 4,10 poin menjadi 61,90. Kebijakan anti-perundungan turun 12,47 poin, kebijakan

pengegasan kekerasan seksual turun 9,01 poin, dan belanja peningkatan mutu guru hanya 2,76 persen. Indeks fasilitas sekolah mencapai 70,90, tetapi indeks kelayakan ruang hanya 22,22. Lembar RKT dan ARKAS juga belum memuat program operasional. Akreditasi telah memicu agenda mutu, tetapi belum sepenuhnya menjadi sistem pengendalian kebijakan berkelanjutan. Sekolah perlu mengintegrasikan hasil akreditasi dan Rapor Pendidikan ke dalam perencanaan tahunan, penganggaran, indikator kinerja, dan evaluasi triwulanan.

Kata Kunci: akreditasi sekolah, kebijakan pendidikan, penjaminan mutu, Rapor Pendidikan, perencanaan berbasis data

A. Pendahuluan

Akreditasi merupakan instrumen penjaminan mutu eksternal yang menilai kelayakan dan kinerja satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2023 menempatkan akreditasi sebagai penilaian kelayakan satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh badan akreditasi yang mandiri dan profesional. Arah kebijakan terbaru juga bergerak dari pemeriksaan kelengkapan administratif menuju pemotretan mutu layanan dan kinerja sekolah. Karena itu, hasil akreditasi seharusnya tidak berhenti sebagai peringkat, tetapi menjadi masukan untuk penyusunan kebijakan, program perbaikan, pengembangan tenaga pendidik, dan pengalokasian anggaran. Standar pengelolaan juga menempatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai satu siklus yang harus dijalankan secara konsisten oleh

satuan pendidikan (Pemerintah Republik Indonesia, 2023b).

Perubahan paradigma tersebut penting karena hubungan antara akreditasi dan mutu sekolah tidak selalu bersifat otomatis. Karwono dan Susetyo (2021) menunjukkan bahwa instrumen berbasis kinerja berfokus pada mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Namun, komponen mutu guru masih menjadi salah satu titik lemah dalam peta mutu nasional. Studi Afriliandhi dan Hasanah (2022) juga menemukan bahwa guru memandang akreditasi sebagai sistem penjaminan mutu yang kredibel, tetapi proses pemenuhan bukti kinerja membutuhkan upaya besar. Temuan itu menunjukkan dua fungsi akreditasi. Pertama, akreditasi memberi standar dan legitimasi mutu. Kedua, akreditasi menciptakan tekanan organisasi agar sekolah menyesuaikan kebijakan dan praktiknya.

Dalam perspektif teori institusional, organisasi dapat mengadopsi aturan formal untuk memperoleh legitimasi, tetapi praktik sehari-hari belum tentu terhubung kuat dengan aturan tersebut (Meyer & Rowan, 1977). Kondisi ini disebut kesenjangan antara struktur formal dan praktik operasional. Pada sekolah, kesenjangan dapat muncul ketika dokumen akreditasi, rencana kerja, dan kebijakan perlindungan peserta didik tersedia, tetapi implementasi, penganggaran, pemantauan, dan evaluasinya tidak berjalan konsisten. Oleh karena itu, analisis pengaruh akreditasi perlu memeriksa bukan hanya status akreditasi, tetapi juga perubahan capaian layanan, isi kebijakan, pola pembelanjaan, kapasitas guru, dan kondisi sarana prasarana.

SMP Negeri 2 Pujut merupakan sekolah negeri berakreditasi B di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Data sekolah memperlihatkan kombinasi capaian yang menarik. Pada satu sisi, capaian literasi dan numerasi tahun 2025 meningkat secara tajam. Pada sisi lain, beberapa indikator kebijakan sekolah, iklim kesetaraan gender, kebinekaan, partisipasi warga sekolah, dan belanja peningkatan

mutu guru menurun atau berada pada kategori kurang. Kondisi sarana juga menunjukkan perbedaan antara ketersediaan fasilitas dan kelayakan ruang. Perbedaan ini perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana akreditasi B telah memengaruhi arah kebijakan sekolah secara substantif.

Penelitian terdahulu banyak membahas hubungan akreditasi dengan hasil ujian, kualitas lulusan, persepsi guru, dan reformasi sistem akreditasi pada tingkat agregat (Azhari et al., 2020; Hasanah et al., 2021; Susetyo & Muksin, 2022; Wahyuni et al., 2019). Kajian pada tingkat satuan pendidikan yang mengintegrasikan status akreditasi, Rapor Pendidikan, data guru, kondisi sarana, rekomendasi Perencanaan Berbasis Data, serta dokumen RKT dan ARKAS masih terbatas (Nabila et al., 2025). Artikel ini mengisi celah tersebut melalui studi kasus pada satu SMP negeri. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan data administratif aktual untuk menilai hubungan antara tekanan akreditasi, capaian layanan, dan penerjemahan hasil evaluasi ke dalam kebijakan operasional.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan kondisi mutu SMP Negeri 2 Pujut dalam konteks

akreditasi B; (2) menganalisis implikasi akreditasi terhadap kebijakan pembelajaran, perlindungan peserta didik, pengembangan guru, pengelolaan anggaran, dan sarana prasarana; serta (3) merumuskan prioritas kebijakan berbasis data untuk memperkuat peningkatan mutu berkelanjutan. Istilah pengaruh dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan arah implikasi dan keterkaitan kebijakan pada tingkat kasus, bukan untuk menyatakan kausalitas statistik.

B. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif-evaluatif dengan dukungan analisis kuantitatif deskriptif. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu satuan pendidikan dan menilai keterkaitan antara status akreditasi, capaian mutu, serta dokumen kebijakan sekolah. Unit analisis adalah SMP Negeri 2 Pujut dengan NPSN 50201430.

Sumber data terdiri atas lima kelompok dokumen. Pertama, profil sekolah tertanggal 2 Juli 2026 yang memuat status akreditasi, peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan kondisi ruang. Kedua, daftar guru yang diunduh pada 29 Juli 2026.

Ketiga, Rapor Pendidikan tahun 2025 yang diperbarui pada 16 Juni 2026 dan memuat capaian tahun 2025 serta perubahan dari tahun 2024. Keempat, rekomendasi keseluruhan dan rekomendasi prioritas Perencanaan Berbasis Data. Kelima, lembar kerja RKT dan ARKAS. Data personal guru tidak dianalisis secara individual. Penelitian hanya menggunakan data agregat untuk menjaga kerahasiaan.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, data diverifikasi dengan membandingkan informasi antardokumen dan menghitung ulang data yang tidak konsisten. Sebagai contoh, jumlah peserta didik tahun 2025/2026 dihitung dari 104 siswa kelas VII, 100 siswa kelas VIII, dan 103 siswa kelas IX sehingga totalnya 307 siswa, bukan angka total yang tertulis pada profil. Kedua, indikator dikelompokkan ke dalam lima bidang kebijakan, yaitu hasil belajar, proses pembelajaran dan pengembangan guru, iklim dan perlindungan peserta didik, tata kelola dan pembiayaan, serta sarana prasarana. Ketiga, capaian 2025 dibandingkan dengan 2024 untuk menemukan arah perubahan. Keempat, hasil dibandingkan dengan isi rekomendasi PBD dan keterisian dokumen RKT serta ARKAS.

Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber, pemeriksaan konsistensi angka, dan penggunaan indikator yang berasal dari sistem resmi. Analisis tidak menggunakan uji inferensial karena penelitian hanya memiliki satu sekolah dan satu status akreditasi. Konsekuensinya, hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi sebagai efek kausal akreditasi untuk seluruh sekolah. Hasil lebih tepat dibaca sebagai evaluasi mendalam mengenai cara status akreditasi B berhubungan dengan arah kebijakan dan praktik pengelolaan mutu di SMP Negeri 2 Pujut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Profil Institusional dan Kapasitas Sumber Daya

SMP Negeri 2 Pujut berdiri pada tahun 1981 dan memiliki status

akreditasi B. Pada tahun ajaran 2025/2026, sekolah melayani 307 peserta didik dalam 11 rombongan belajar. Daftar guru terbaru memuat 30 guru, yang terdiri atas 12 PNS, 6 PPPK, 2 PPPK paruh waktu, dan 10 guru honorer daerah. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa 60 persen guru berstatus ASN, sedangkan 40 persen masih berstatus non-ASN atau paruh waktu. Rasio kasar peserta didik terhadap guru adalah sekitar 10,23 siswa per guru. Rasio ini relatif memadai secara kuantitas, tetapi belum menggambarkan kesesuaian mata pelajaran, kompetensi, dan beban kerja.

Tabel 1 Profil Ringkas SMP Negeri 2 Pujut

Komponen	Data	Interpretasi
Akreditasi	B	Mutu layanan telah memenuhi standar pada tingkat baik, tetapi masih memerlukan peningkatan untuk mencapai kategori lebih tinggi.
Peserta didik	307 siswa, 11 rombel	Dihitung ulang dari jumlah siswa per tingkat pada profil sekolah tahun 2025/2026.
Guru	30 orang	12 PNS, 6 PPPK, 2 PPPK paruh waktu, dan 10 honorer daerah.
Rasio siswa-guru	10,23 : 1	Ketersediaan guru cukup secara agregat, tetapi kesesuaian bidang mengajar tetap perlu ditata.
Ruang kelas	15 ruang	8 baik, 5 rusak sedang, dan 2 rusak berat.

Komponen	Data	Interpretasi
Fasilitas TIK	Indeks 100	Ketersediaan TIK, internet, dan listrik dinilai sangat tinggi.
Kelayakan ruang	Indeks 22,22	Kondisi fisik ruang menjadi kelemahan utama sarana prasarana.

Sumber: Profil sekolah, daftar guru, dan Rapor Pendidikan SMP Negeri 2 Pujut, diolah peneliti (2026).

Kondisi ruang menunjukkan persoalan yang cukup serius. Dari 15 ruang kelas, hanya 8 ruang berada dalam kondisi baik, 5 ruang rusak sedang, dan 2 ruang rusak berat. Perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, ruang multimedia, ruang guru, ruang tata usaha, toilet, ruang OSIS, dan lobi juga tercatat mengalami kerusakan sedang. Temuan ini konsisten dengan indeks kelayakan ruang sebesar 22,22 yang berada pada kategori kurang. Dengan demikian, ketersediaan bangunan belum sama dengan kelayakan bangunan untuk mendukung proses belajar yang aman dan efektif.

2. Capaian Hasil Belajar dan Proses Pembelajaran

Rapor Pendidikan 2025 memperlihatkan kemajuan kuat pada hasil belajar dasar. Kemampuan literasi mencapai 66,67 persen peserta didik yang memenuhi kompetensi minimum, naik 33,34 poin dari 33,33 persen pada 2024. Kemampuan numerasi mencapai 64,44 persen, naik 28,88 poin dari

35,56 persen. Karakter juga meningkat 3,78 poin menjadi 51,98. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembelajaran telah menghasilkan perbaikan pada keluaran utama yang menjadi perhatian akreditasi berbasis kinerja.

Kemajuan hasil belajar belum sepenuhnya diikuti kualitas proses yang tinggi. Indikator kualitas pembelajaran berada pada skor 58,90 dengan kategori sedang. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru berada pada skor 60,66 dan meningkat 1,67 poin. Kepemimpinan instruksional memperoleh skor 55,34, meskipun dikategorikan baik, tetapi turun 1,96 poin. Pola ini menunjukkan bahwa perbaikan literasi dan numerasi perlu dilembagakan melalui supervisi akademik, komunitas belajar, analisis hasil asesmen, dan tindak lanjut yang lebih sistematis agar tidak bersifat sementara.

3. Kebijakan Iklim Sekolah dan Perlindungan Peserta Didik

Akreditasi menuntut sekolah menyediakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menghargai

keberagaman. SMP Negeri 2 Pujut menunjukkan capaian iklim keamanan sebesar 68,72 dan meningkat 5,72 poin. Iklim inklusivitas juga naik 4,72 poin menjadi 55,72. Namun, iklim kesetaraan gender turun 11,84 poin menjadi 53,16 dan masuk kategori kurang. Iklim kebinekaan turun 6,07 poin menjadi 59,93. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan formal belum cukup menjaga kualitas interaksi sosial dan persepsi warga sekolah.

Indikator program dan kebijakan satuan pendidikan memperoleh skor 61,90, turun 4,10 poin dari 66,00.

Penurunan paling tajam terjadi pada kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan sebesar 12,47 poin. Kebijakan terkait rokok, minuman keras, dan narkoba turun 10,28 poin. Kebijakan pencegahan kekerasan seksual turun 9,01 poin. Sebaliknya, kebijakan kesetaraan gender naik 2,26 poin dan kebijakan pencegahan intoleransi naik 3,69 poin. Data ini memperlihatkan bahwa dokumen atau program kebijakan mungkin tersedia, tetapi konsistensi pelaksanaan, komunikasi, pengawasan, dan pengalaman peserta didik belum merata.

Tabel 2 Indikator Kunci yang Berhubungan dengan Kebijakan Pendidikan

Indikator	Skor 2025	Perubahan	Status	Makna Kebijakan
Kemampuan literasi	66,67%	+33,34	Sedang	Program literasi perlu dipertahankan lintas mata pelajaran.
Kemampuan numerasi	64,44%	+28,88	Sedang	Sekitar sepertiga siswa masih di bawah kompetensi minimum.
Kualitas pembelajaran	58,90	+1,90	Sedang	Perkuat metode interaktif, asesmen formatif, dan diferensiasi.
Refleksi guru	60,66	+1,67	Sedang	Rutinisasikan komunitas belajar dan tindak lanjut data.
Iklim kesetaraan gender	53,16	-11,84	Kurang	Evaluasi praktik kesetaraan dalam pembelajaran dan kegiatan siswa.
Iklim kebinekaan	59,93	-6,07	Sedang	Perkuat konsistensi program toleransi dan kebinekaan.
Program dan kebijakan sekolah	61,90	-4,10	Sedang	Kebijakan tersedia, tetapi pengalaman layanan belum stabil.
Kebijakan anti-perundungan	58,77	-12,47	Sedang	Perkuat pelaporan, respons kasus, edukasi, dan evaluasi.
Kebijakan kekerasan seksual	53,27	-9,01	Sedang	Perkuat pencegahan, kanal aduan, dan kapasitas tim.
Belanja mutu guru	2,76%	-0,50	Kurang	Naikkan prioritas anggaran pengembangan profesional guru.

Indikator	Skor 2025	Perubahan	Status	Makna Kebijakan
Kelayakan ruang	22,22	Tidak tersedia	Kurang	Prioritaskan rehabilitasi dalam RKT dan ARKAS.

Sumber: Rapor Pendidikan SMP Negeri 2 Pujut Tahun 2025, diolah peneliti (2026). Tanda positif menunjukkan kenaikan dari 2024 dan tanda negatif menunjukkan penurunan.

4. Kebijakan Pengembangan Guru dan Pengelolaan Anggaran

Proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu hanya 25,18 dan berada pada kategori kurang. Komponen yang paling rendah adalah proporsi pembelanjaan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan sebesar 2,76 persen, turun 0,50 poin dari tahun sebelumnya. Pembelanjaan nonpersonel untuk mutu pembelajaran sebesar 22,42 persen dan hanya naik 0,98 poin. Temuan ini penting karena hasil akreditasi nasional menunjukkan bahwa mutu guru sering menjadi komponen terlemah (Karwono & Susetyo, 2021). Akreditasi B belum sepenuhnya menggeser struktur anggaran ke pengembangan kapasitas guru yang berkelanjutan.

Pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan anggaran berada pada skor 50 dan turun 5,11 poin. Ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan berada pada skor 100, tetapi proporsi belanja BOS secara daring melalui SIPLah tercatat nol. Pola ini menunjukkan bahwa

kepatuhan pelaporan administratif cukup kuat, sedangkan transformasi proses pembelanjaan belum berjalan. Kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa pengaruh akreditasi lebih terlihat pada kepatuhan formal daripada perubahan sistem kerja secara menyeluruh.

5. Penerjemahan Rapor Pendidikan ke RKT dan ARKAS

Rekomendasi prioritas PBD telah mengidentifikasi iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran, karakter, literasi, numerasi, dan keamanan sekolah sebagai bidang yang perlu dibenahi. Rekomendasi juga menyediakan inspirasi kegiatan dan padanan kegiatan BOS. Namun, lembar kerja RKT dan ARKAS yang dianalisis belum memuat prioritas, akar masalah, kegiatan, penjelasan implementasi, kebutuhan biaya, jadwal, volume, harga satuan, dan total anggaran. Dokumen tersebut masih berupa format dan contoh pengisian.

Kekosongan ini merupakan temuan utama. Akreditasi dan Rapor Pendidikan telah menghasilkan diagnosis, tetapi diagnosis belum

diterjemahkan menjadi keputusan program dan anggaran. Dalam kerangka Perencanaan Berbasis Data, proses seharusnya bergerak melalui tahap identifikasi, refleksi, dan benahi. Tanpa RKT dan ARKAS yang terisi, siklus peningkatan mutu berhenti pada identifikasi. Akibatnya, sekolah sulit memastikan siapa pelaksana program, berapa kebutuhan biaya, kapan kegiatan dilakukan, dan indikator apa yang digunakan untuk menilai keberhasilannya.

6. Akreditasi sebagai Pemicu

Agenda Mutu

Temuan menunjukkan bahwa akreditasi B telah memengaruhi arah perhatian sekolah pada hasil belajar, mutu pembelajaran, lingkungan aman, kompetensi guru, dan pengelolaan fasilitas. Peningkatan literasi dan numerasi memperlihatkan bahwa kebijakan pembelajaran dapat menghasilkan perubahan ketika sekolah memiliki sasaran yang jelas dan menggunakan data capaian. Hasil ini sejalan dengan Azhari et al. (2020) yang menemukan bahwa akreditasi dan anggaran pendidikan berhubungan dengan kualitas lulusan. Wahyuni et al. (2019) juga menunjukkan adanya hubungan

antara komponen standar pendidikan, akreditasi, dan hasil asesmen.

Pengaruh tersebut tidak dapat dibaca sebagai akibat tunggal akreditasi karena banyak faktor lain bekerja secara bersamaan. Namun, akreditasi menyediakan kerangka standar, tuntutan bukti, dan legitimasi bagi kepala sekolah untuk memprioritaskan kegiatan perbaikan. Dalam hal ini, status B berfungsi sebagai sinyal bahwa sekolah telah memenuhi sebagian besar standar, tetapi masih memiliki kesenjangan kinerja. Status tersebut seharusnya menjadi dasar untuk memilih area yang paling strategis agar sekolah bergerak menuju mutu yang lebih tinggi.

Hasil penelitian mendukung pandangan Afriliandhi dan Hasanah (2022) bahwa akreditasi dipercaya sebagai penjaminan mutu, tetapi pelaksanaannya menuntut kerja serius dari kepala sekolah dan guru. Akreditasi memberi manfaat ketika hasilnya digunakan untuk pembelajaran organisasi. Sebaliknya, akreditasi kehilangan fungsi perbaikan jika sekolah hanya menyiapkan bukti pada saat penilaian. BAN-PDM (2025) menekankan pemanfaatan instrumen dan hasil akreditasi untuk peningkatan mutu berkelanjutan. Karena itu, tindak

lanjut setelah akreditasi sama pentingnya dengan proses penilaian.

7. Kesenjangan antara Kebijakan Formal dan Implementasi

Penurunan indikator program dan kebijakan sekolah memperlihatkan kesenjangan antara keberadaan kebijakan dan pengalaman warga sekolah. Kebijakan anti-perundungan, pencegahan kekerasan seksual, pencegahan penyalahgunaan zat, kesetaraan gender, dan pencegahan intoleransi tidak cukup hanya ditetapkan dalam surat keputusan atau program tahunan. Efektivitasnya ditentukan oleh sosialisasi, kejelasan prosedur, kapasitas tim, akses pelaporan, kecepatan respons, perlindungan pelapor, dan evaluasi kasus.

Teori institusional menjelaskan bahwa organisasi dapat mengadopsi struktur formal untuk memenuhi tuntutan eksternal, sementara praktik internal tetap berjalan seperti sebelumnya (Meyer & Rowan, 1977). Pola tersebut terlihat pada SMP Negeri 2 Pujut. Sekolah memiliki status akreditasi B, rekomendasi PBD, indikator program kebijakan, dan format RKT-ARKAS. Namun, dokumen perencanaan belum diisi dan beberapa indikator implementasi

kebijakan menurun. Dengan kata lain, legitimasi formal belum sepenuhnya terhubung dengan sistem kerja.

Hasanah et al. (2021) menunjukkan bahwa guru dan kepala sekolah sebagai pelaksana langsung akreditasi menghadapi tuntutan implementasi yang kompleks. Hendarman (2013) juga mengingatkan bahwa hasil akreditasi sering belum dimanfaatkan secara optimal dalam penentuan kebijakan. Temuan penelitian ini menguatkan masalah tersebut pada tingkat sekolah. Akreditasi telah memotret mutu, tetapi mekanisme tindak lanjut masih lemah.

8. Perencanaan Berbasis Data sebagai Jembatan Kebijakan

Perencanaan Berbasis Data dapat menjadi jembatan antara hasil akreditasi, Rapor Pendidikan, kebijakan sekolah, dan anggaran. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa PBD bertujuan memperbaiki pembelanjaan dan pengelolaan satuan pendidikan melalui tahap identifikasi, refleksi, dan benahi. Dalam konteks SMP Negeri 2 Pujut, data prioritas sudah tersedia, tetapi proses refleksi kolektif dan penerjemahan ke dalam rencana operasional belum terdokumentasi.

Kajian data-based decision making menunjukkan bahwa ketersediaan data saja tidak menjamin perubahan. Sekolah membutuhkan kepemimpinan, budaya kolaboratif, literasi data, serta dukungan kepada guru untuk mengubah data menjadi keputusan pembelajaran (Mandinach & Schildkamp, 2021; Schildkamp, 2019; van Geel et al., 2016). Hebbecker et al. (2022) menemukan bahwa dukungan bagi guru dalam menganalisis data berhubungan positif dengan keputusan instruksional dan kemajuan belajar siswa. Implikasinya, SMP Negeri 2 Pujut perlu membangun forum data rutin, bukan hanya mengunduh Rapor Pendidikan setahun sekali.

Forum tersebut dapat dilaksanakan setiap triwulan dengan agenda yang sederhana. Tim sekolah memilih tiga sampai lima indikator,

memeriksa perkembangan, mengidentifikasi hambatan, dan menetapkan tindakan korektif. Data yang dipantau perlu mencakup hasil belajar, kehadiran, kasus perundungan, pelaksanaan komunitas belajar, realisasi anggaran mutu guru, dan progres rehabilitasi ruang. Pendekatan ini akan mengubah akreditasi dari kegiatan periodik menjadi pengendalian mutu yang berjalan sepanjang tahun.

9. Prioritas Kebijakan untuk Peningkatan Akreditasi

Berdasarkan hasil analisis, sekolah memerlukan kebijakan yang fokus dan terukur. Prioritas tidak boleh terlalu banyak karena kapasitas anggaran dan tenaga pelaksana terbatas. Lima paket kebijakan berikut dapat dimasukkan ke dalam RKT dan ARKAS.

Tabel 3 Rancangan Prioritas Kebijakan Berbasis Data

Prioritas	Masalah Data	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja	Waktu Evaluasi
1. Perlindungan peserta didik	Anti-perundungan - 12,47; kekerasan seksual -9,01	Audit kebijakan; perkuat tim dan kanal aduan; edukasi; simulasi penanganan.	100% warga sekolah tersosialisasi; laporan ditindaklanjuti; rasa aman meningkat.	Bulanan dan triwulanan
2. Kesenjangan dan kebinekaan	Iklim gender - 11,84; kebinekaan - 6,07	Integrasi materi; proyek lintas budaya; evaluasi kegiatan; pelibatan orang tua.	Skor gender dan kebinekaan meningkat; tidak ada pembatasan berbasis stereotip.	Per semester

Prioritas	Masalah Data	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja	Waktu Evaluasi
3. Kualitas pembelajaran	Kualitas pembelajaran 58,90; refleksi guru 60,66	Komunitas belajar; observasi sejawat; asesmen formatif; tindak lanjut literasi-numerasi.	Satu siklus refleksi per guru per bulan; literasi dan numerasi tidak menurun.	Bulanan
4. Pengembangan guru	Belanja mutu guru hanya 2,76%	Pemetaan kompetensi; pelatihan berbasis kebutuhan; diseminasi; coaching.	Realisasi pengembangan profesional meningkat; pelatihan menghasilkan praktik kelas.	Triwulanan
5. Rehabilitasi ruang	Kelayakan ruang 22,22; 7 kelas rusak sedang/berat	Audit teknis; urutan rehabilitasi; anggaran bertahap; koordinasi dengan dinas.	Ruang rusak berat ditangani lebih dahulu; indeks kelayakan meningkat.	Bulanan untuk proyek, semester untuk hasil

Sumber: Hasil sintesis Rapor Pendidikan, rekomendasi PBD, profil sekolah, dan dokumen perencanaan, diolah peneliti (2026).

Prioritas pertama harus ditempatkan pada perlindungan peserta didik karena penurunan indikator perundungan dan kekerasan seksual cukup besar. Kebijakan ini tidak selalu membutuhkan anggaran tinggi. Sekolah dapat memperbaiki prosedur, membentuk jadwal sosialisasi, membuat kanal aduan, dan melakukan evaluasi kasus dengan sumber daya internal. Anggaran dibutuhkan untuk pelatihan, media edukasi, dan dukungan narasumber apabila kapasitas tim belum memadai.

Prioritas kedua adalah pengembangan guru. Nilai 2,76 persen menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi belum memperoleh porsi kuat dalam struktur belanja mutu. Sekolah perlu memastikan setiap kegiatan pelatihan

terkait langsung dengan masalah data, seperti metode pembelajaran, literasi, numerasi, kesetaraan gender, kebinekaan, dan perlindungan peserta didik. Pelatihan juga perlu diikuti diseminasi, praktik kelas, observasi, dan refleksi agar tidak berhenti pada sertifikat.

Prioritas ketiga adalah rehabilitasi sarana. Indeks fasilitas TIK sebesar 100 merupakan modal untuk pembelajaran dan manajemen data. Namun, modal tersebut tidak akan optimal ketika ruang kelas dan ruang pendukung mengalami kerusakan. RKT dan ARKAS perlu memuat urutan penanganan berdasarkan risiko keselamatan dan pengaruh terhadap pembelajaran. Sekolah juga perlu mengajukan kebutuhan yang tidak dapat ditanggung BOS kepada dinas

pendidikan atau program rehabilitasi pemerintah daerah.

D. Kesimpulan

Status akreditasi B berkaitan dengan arah kebijakan pendidikan SMP Negeri 2 Pujut, terutama pada penetapan agenda mutu, perhatian terhadap hasil belajar, pemenuhan standar layanan, dan penyediaan bukti kinerja. Keterkaitan positif terlihat pada kenaikan literasi dan numerasi yang kuat, peningkatan iklim keamanan, serta ketersediaan fasilitas TIK. Akreditasi memberi kerangka bagi sekolah untuk mengenali kekuatan dan kelemahannya.

Namun, pengaruh tersebut belum konsisten pada tingkat implementasi. Indikator program dan kebijakan sekolah menurun. Kebijakan anti-perundungan, pencegahan kekerasan seksual, kesetaraan gender, dan kebinekaan masih memerlukan penguatan. Pembelanjaan peningkatan mutu guru sangat rendah. Kelayakan ruang juga menjadi kelemahan utama. Kekosongan lembar RKT dan ARKAS menunjukkan bahwa hasil akreditasi dan Rapor Pendidikan belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi

program, jadwal, penanggung jawab, indikator, dan anggaran.

Sekolah disarankan segera menyusun RKT dan ARKAS berbasis lima prioritas, yaitu perlindungan peserta didik, kesetaraan dan kebinekaan, kualitas pembelajaran, pengembangan guru, dan rehabilitasi ruang. Setiap prioritas perlu memiliki indikator terukur dan dievaluasi secara triwulanan. Dinas pendidikan perlu memberi pendampingan perencanaan, dukungan rehabilitasi sarana, serta penguatan kapasitas sekolah dalam menggunakan data. Dengan langkah tersebut, akreditasi tidak hanya menjadi status formal, tetapi berfungsi sebagai sistem pengendalian mutu yang mendorong perbaikan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari satu sekolah sehingga tidak dapat menguji hubungan kausal atau membandingkan sekolah berdasarkan peringkat akreditasi. Beberapa data administratif juga menunjukkan perbedaan waktu pembaruan dan ketidakkonsistenan jumlah. Penelitian berikutnya perlu melibatkan beberapa sekolah berakreditasi A, B, dan C, menggunakan data longitudinal, serta menambahkan wawancara kepala

sekolah, guru, siswa, orang tua, dan dinas pendidikan. Desain tersebut dapat menguji apakah perubahan akreditasi benar-benar diikuti perubahan kebijakan, anggaran, praktik pembelajaran, dan hasil belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriliandhi, C., & Hasanah, E. (2022). Indonesian teacher's perspective about school accreditation. *Pegem Journal of Education and Instruction*, 13(1), 109-116. doi:10.47750/pegegog.13.01.13
- Azhari, A., Kamaruddin, K., Marzuki, M., & Dewi, R. (2020). Do school accreditation, education budget, and teacher's competence matter for graduate's quality? *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 1-8. doi:10.21009/JPEB.009.1.1
- Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. (2025). *Panduan akreditasi untuk sekolah/madrasah*. <https://ban-pdm.id/news/detail/2025/1/unduh-panduan-akreditasi-untuk-sekolahmadrasah>
- Hasanah, E., Sukirman, S., Afriliandhi, C., & Wijayanto, A. (2021). Implementasi akreditasi dalam perspektif guru dan kepala sekolah di Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(3), 357-365. doi:10.36312/jime.v7i3.2250
- Hebbecker, K., Förster, N., Forthmann, B., & Souvignier, E. (2022). Data-based decision-making in schools: Examining the process and effects of teacher support. *Journal of Educational Psychology*, 114(7), 1695-1721. doi:10.1037/edu0000530
- Hendarman. (2013). Pemanfaatan hasil akreditasi dan kredibilitas asesor sekolah/madrasah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(4), 532-542. doi:10.24832/jpnk.v19i4.308
- Karwono, H., & Susetyo, B. (2021). Peta mutu satuan pendidikan di Indonesia berdasarkan akreditasi tahun 2020. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 14(1), 1-10. doi:10.24832/jpkp.v14i1.434
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Tentang Perencanaan Berbasis Data*. <https://pusatinformasi.rumahpendidikan.kemendikdasmen.go.id/hc/id/articles/52441785548441-Tentang-Perencanaan-Berbasis-Data-PBD>
- Mandinach, E. B., & Schildkamp, K. (2021). Misconceptions about data-based decision making in education: An exploration of the literature. *Studies in Educational Evaluation*, 69, 100842. doi:10.1016/j.stueduc.2020.100842
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340-363. doi:10.1086/226550
- Nabila, A., Raihani, R., Yuliani, Y., Aslamiah, A., & Cinantya, C. (2025). Akreditasi sekolah sebagai jaminan mutu pendidikan pada SMA Negeri 1 dan 2 Paringin. *Satya Widya*, 41(1), 63-73. doi:10.24246/j.sw.2025.v41.i1.p63-73
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023a). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/2>

- 64189/permendikbudriset-no-38-tahun-2023
Pemerintah Republik Indonesia. (2023b). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/289462/permendikbudriset-no-47-tahun-2023>
- Schildkamp, K. (2019). Data-based decision-making for school improvement: Research insights and gaps. *Educational Research*, 61(3), 257-273.
doi:10.1080/00131881.2019.1625716
- Susetyo, B., & Muksin, H. (2022). Reformasi akreditasi sekolah/madrasah: Pendekatan model prediksi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(1), 13-24.
doi:10.24832/jpnk.v7i1.2423
- van Geel, M., Keuning, T., Visscher, A. J., & Fox, J.-P. (2016). Assessing the effects of a school-wide data-based decision-making intervention on student achievement growth in primary schools. *American Educational Research Journal*, 53(2), 360-394.
doi:10.3102/0002831216637346
- Wahyuni, R., Susetyo, B., & Fitrianto, A. (2019). Hubungan akreditasi dan ujian nasional pada sekolah negeri dengan generalized structured component analysis. *Indonesian Journal of Statistics and Its Applications*, 3(3), 260-271.
doi:10.29244/ijsa.v3i3.342